

Komunikasi Kebijakan SBSN Bidang Pertahanan TNI Angkatan Laut TA 2021

Teguh Waskita Aditama
Seskoal
Email: teguhwaskita1@gmail.com

Diterima: 6 Januari 2025	Diterima Setelah Revisi: 21 April 2025	Dipublikasikan: 25 April 2025
-----------------------------	---	----------------------------------

Abstrak

Penggunaan SBSN untuk Kemhan TNI merupakan sebuah kebijakan baru bagi pemerintah di bidang Pertahanan yaitu pembangunan rumah negara untuk prajurit di pangkalan Angkatan Laut (Lantamal). Namun, proses komunikasi implementasi kebijakan pada Tahun Anggaran 2021 terjadi missinglink yang membuat antar lembaga utamanya Kemenhan dan TNI belum sepenuhnya mengetahui dan memahami kebijakan Anggaran SBSN itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan publik antara Lembaga negara yaitu Kemhan, Kemkeu dan Bappenas, sehingga TNI AL mendapatkan anggaran SBSN tahun 2021. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yaitu Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenhan dan TNI AL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, yakni berusaha memahami realita pengalaman yang dengan paradigma konstruktivis ini penulis menggunakannya untuk menganalisis komunikasi kebijakan publik antara Lembaga negara yaitu Kemhan, Kemkeu dan Bappenas. Hasil penelitian ini menunjukkan ada missinglink atau masalah komunikasi dalam lingkaran SDM ketiga kementerian tersebut yang mempengaruhi disposisi, SDM dan struktur birokrasi. Performa komunikasi yang terjalin pada implementasi tahun 2021 cukup baik dilakukan, sehingga program tersebut dapat terealisasi. Namun, performa komunikasi pada proses awal perencanaan yaitu pada tahun 2019-2020 kurang baik antar ketiga kementerian tersebut, dikarenakan belum adanya persamaan persepsi terkait program SBSN.

Kata Kunci: Performa, Komunikasi Kebijakan Publik, SBSN

Abstract

The use of SBSN for the TNI Ministry of Defense is a new policy for the government in the field of Defense, namely the construction of state housing for soldiers at the Navy base (Lantamal). However, the communication process for implementing the policy in the 2021 Fiscal Year experienced a missing link which made the main institutions, namely the Ministry of Defense and the TNI, not fully know and understand the SBSN Budget policy. This study aims to analyze public policy communication between state institutions, namely the Ministry of Defense, Ministry of Finance and Bappenas, so that the Indonesian Navy receives the 2021 SBSN budget. The informants in this study were the parties involved in policy implementation, namely the Ministry of Bappenas, Ministry of Finance, Ministry of Defense and the Indonesian Navy. This study uses a qualitative approach with a constructivist paradigm, namely trying to understand the reality of experience which with this constructivist paradigm the author uses to analyze public policy communication between state institutions, namely the Ministry of Defense, Ministry of Finance and Bappenas. The results of this study indicate that there is a missing link or communication problem in the HR circle of the three ministries which affects the disposition, HR and bureaucratic structure. The communication performance established in the implementation of 2021 was quite good, so that the program could be realized. However, the communication performance in the early planning process, namely in

2019-2020, was not good between the three ministries, due to the lack of a common perception regarding the SBSN program.

Keywords: *Performance, Public Policy Communication, SBSN*

1 PENDAHULUAN

Pangkalan merupakan bagian dari komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), harus dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan dukungan logistik secara optimal terhadap kelancaran operasional komponen SSAT. Dalam meningkatkan pertahanan pangkalan salah satunya adalah dengan membangun rumah prajurit yang merupakan bagian dari fasilitas perawatan personel (faswatpers). Selain itu, ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit. Tapi hal ini terhambat karena keterbatasan anggaran.

Namun, pada tahun 2019 terdapat sebuah alternatif baru untuk mengatasi keterbatasan anggaran TNI yang merupakan hasil koordinasi dan komunikasi diantara tiga lembaga negara dimana Lembaga negara ini saling terkait dalam proses penyusunan dan penetapan APBN yaitu Kemhan, Bapenas dan Kemkeu yaitu penggunaan sukuk negara untuk menambah sumber anggaran APBN Kemhan selain dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penggunaan sukuk negara yang dimaksud adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tanggal 22 Desember 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang menandakan lahirnya SBSN untuk pembiayaan proyek di lingkungan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang SBSN pada Desember 2011, Kemhan TNI baru mendapatkan akses untuk mengusulkan proyek yang dapat dibiayai menggunakan SBSN pada awal tahun 2020 yang disesuaikan proses pengusulannya dengan pengusulan RKAKL TA 2021. Sejak disahkannya peraturan pemerintah tentang SBSN pada tahun 2011 masih terdapat keterbatasan akses dan informasi tentang pembiayaan SBSN di lingkungan Kemhan TNI terutama di TNI AL sampai dengan 2021.

SBSN diharapkan menjadi sebuah alternatif solusi untuk menambah anggaran di sektor tertentu yang dapat mempercepat perkembangan organisasi dan peningkatan kesejahteraan prajurit di lingkungan TNI. Penggunaan SBSN untuk Kemhan TNI merupakan sebuah kebijakan baru bagi pemerintah dimana untuk pertama kalinya menggunakan SBSN di bidang pertahanan yaitu pembangunan rumah negara untuk prajurit di pangkalan Angkatan Laut (Lantamal). Rumah prajurit merupakan bagian dari fasilitas perawatan personel (faswatpers) suatu pangkalan TNI AL yang akan memudahkan suatu pangkalan dalam proses pergeseran pasukan, pergeseran logistik, kegiatan pangkalan lainnya serta pertahanan pangkalan.

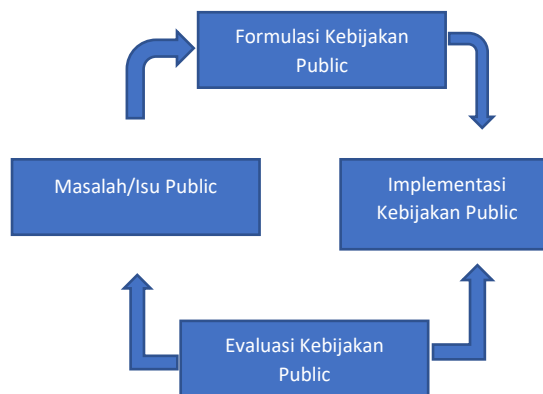
Namun, dalam praktik komunikasi implementasi kebijakan SBSN di bidang pertahanan, khususnya pada TNI Angkatan Laut Tahun Anggaran 2021, masih terdapat indikasi adanya tantangan dalam penyampaian informasi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti Kementerian Pertahanan, TNI AL, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Hal ini mendorong perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana pola, efektivitas, dan kendala dalam proses komunikasi kebijakan antar lembaga tersebut, guna memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye, kebijakan publik merupakan kebijaksanaan sebagai opsi penguasa buat melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu. Hugh Heglo Kebijaksanaan selaku tindakan yang berarti menggapai misi tertentu isi kebijaksanaan: (1) misi, (2) konsep ataupun ide yang ialah alat ataupun metode khusus buat mencapainya, (3) Program ataupun metode khusus yang telah menemukan persetujuan, (4) Ketetapan, aksi khusus yang didapat, (5) akibat (Abidin, 2012).

Pada proses pembuatan kebijakan publik, merujuk dalam Cochran serta Malone, (1999) dibagi kedalam 5 jenjang, ialah pengenalan permasalahan serta skedul setting, perumusan kebijaksanaan, mengangkat, aplikasi serta penilaian. Tetapi, para ahli kebijaksanaan publik mempermudah jenjang jadi 3 langkah, ialah perumusan kebijaksanaan, penerapan kebijaksanaan serta penilaian kebijaksanaan. Perihal ini bisa ditafsirkan selaku selanjutnya:



Gambar 1. Tahapan Kebijakan Public
Sumber : Mustopadjaja (2002)

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Penerapan kebijakan dalam prinsipnya merupakan metode supaya suatu kebijaksanaan bisa meraih tujuannya (Nugroho, 2012) Perihal itu pula searah dengan pandangan Van M serta Van Horn (dalam Wahab, 2006) yang mendefinisikan penerapan kebijaksanaan selaku tindakan-aksi yang dicoba baik oleh individu, pejabat atau kelompok golongan penguasa ataupun swasta yang ditunjukkan dalam tercapainya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan.

Syafri (2010) melaporkan kalau bentuk penerapan kebijaksanaan ini, keberhasilannya amat ditetapkan sebagian faktor penting. Edward III pada Pasolong (2013), melaporkan kalau faktor-faktor itu: (1) komunikasi; (2) basis energi; (3) tindakan implementer (dispositions); serta (4) bentuk birokrasi.

Bagi Edward III mengatakan data hal kebijaksanaan khalayak butuh dikomunikasikan pada pelaku kebijaksanaan supaya para pelaksana kebijaksanaan bisa mengenali apa yang wajib mereka persiapkan serta jalani pelaksanaan kebijakan itu alhasil misi serta target kebijakan bisa diraih sesuai dengan yang diharapkan. Edward melihat dalam komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi, antara lain format transmisi (transmission), kejelasan (clarity) serta kestabilan (consistency).

Aspek sumberdaya memiliki andil berarti pada aplikasi kebijakan.. Bagi Edward III pada Widodo (2010) kalau sumberdaya itu mencakup sumberdaya orang, sumberdaya perhitungan, serta sumberdaya perlengkapan serta sumberdaya wewenang.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010) disposisi merupakan adanya keinginan, kemauan serta kecondongan para pelaku kebijakan untuk melakukan kebijakan, dengan demikian apa yang jadi misi kebijakan dapat diwujudkan.

Struktur birokrasi ini bagi Edward III (dalam Widodo, 2010) melingkupi segi-segi semacam bentuk birokrasi, pemberian wewenang, hubungan antara unit-unit kelompok serta serupanya.

Bagi Edward III (dalam Widodo, 2010) ada 2 karakter penting birokrasi ialah Standar Operational Procedure (SOP) serta fragmentasi. Standard operational procedure (SOP) ialah kemajuan dari desakan dalam hendak kejelasan durasi, basis energi dan keinginan penyamaan pada kelompok kegiatan yang lingkungan serta besar.

Fragmentasi ialah penyebaran tanggung jawab sesuatu kebijakan pada sebagian tubuh yang berlainan sehingga membutuhkan koordinasi. Edward III dalam Widodo (2010), menyatakan bentuk birokrasi yang terfragmentasi atau terpecah-pecah dapat meningkatkan kegagalan komunikasi, sebab peluang terdistorsi informasi atau intruksi amat besar. Sehingga merembet pada terdistorsinya penerapan kebijakan.

Tabel 1. Teknik Implementasi Kebijakan Edward III

Indikator	Pengukuran
Komunikasi	Apakah ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan
Sumberdaya	Jumlah Staf Keahlian dari para pelaksana informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana
Disposisi	respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksanaan untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan intensitas respon
Struktur Birokrasi	Kesesuaian karakteristik dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan Kesesuaian norma-norma dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan-hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2.3 Komunikasi Kebijakan Publik

Komunikasi kebijakan bagi Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk menambah koordinasi, memberi data serta pemuas keinginan social. Dengan begitu komunikasi bisa mensupport pendapatan misi kelompok bila komunikasi pada kelompok berjalan dengan cara efisien serta berdaya guna. Komunikasi bagi Agustino (2006), ialah salah satu elastis berarti yang pengaruhi aplikasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan kesuksesan pendapatan misi dari aplikasi kebijakan publik. penerapan yang efisien hendak terselenggara, bila para pembuat keputusan mengetahui apa yang hendak dilakukan.

Selanjutnya, George C. Edward sebagaimana dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi didalam implementasi kebijakan, yaitu: Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.

Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, di mana menurut Creswell (2016), studi kasus merupakan sebuah eksplorasi terhadap suatu sistem yang terikat oleh waktu dan tempat, dengan fokus pada kasus atau serangkaian kasus yang dikaji secara mendalam melalui pengumpulan data dari berbagai sumber informasi yang kaya dan relevan dalam konteks tertentu. Penelitian ini mengambil kasus implementasi komunikasi kebijakan SBSN bidang pertahanan pada TNI Angkatan Laut Tahun Anggaran 2021 sebagai objek kajian, yang memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan lintas lembaga yakni Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan TNI AL yang masing-masing memiliki peran, kepentingan, serta gaya komunikasi birokrasi yang berbeda-beda. Keunikan kasus ini terletak pada kompleksitas koordinasi dan transfer informasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan anggaran berbasis SBSN, yang berpotensi memunculkan kesenjangan pemahaman serta perbedaan persepsi di antara institusi yang terlibat. Dengan karakteristik tersebut, studi ini penting untuk menggali secara mendalam bagaimana proses komunikasi kebijakan berlangsung dalam realitas implementasinya di lingkungan TNI AL. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi pustaka, serta dokumentasi dari media sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika komunikasi kebijakan SBSN di bidang pertahanan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif, yaitu berangkat dari hal-hal khusus (induktif) menuju hal umum (deduksi). proses induktif ini diawali dengan pengumpulan data secara teliti, kemudian mengembangkan teori dan menguji validitasnya. selanjutnya dibuat kesimpulan akhir. Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola dan kategori-kategori.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Formulasi awal kebijakan

SBSN disusun sebagai alternatif pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan proyek-proyek berskala nasional yang bersifat umum dan tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang berfungsi sebagai payung hukum utama atau aturan umum. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui SBSN yang mengatur aspek teknis implementasinya. Meski demikian, penerapan SBSN dalam mendukung proyek di lingkungan militer, khususnya TNI, baru mulai terealisasi pada tahun anggaran 2020, sedangkan TNI Angkatan Laut baru mengimplementasikan kebijakan ini dalam pembangunan perumahan prajurit pada Tahun Anggaran 2021. Rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak diundangkannya UU SBSN pada 2008 hingga implementasi di lingkungan TNI AL pada 2021, menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penyebaran informasi dan sosialisasi kebijakan antar lembaga pemerintah. Indikasi adanya keterlambatan ini menunjukkan bahwa perlu ditelusuri lebih dalam apakah hambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi, perbedaan persepsi antar instansi, atau keterbatasan dalam mekanisme sosialisasi kebijakan di sektor pertahanan. Untuk itulah, penelitian ini berupaya menggali lebih lanjut melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen guna memahami bagaimana proses komunikasi kebijakan SBSN berlangsung serta apa saja faktor yang mempengaruhi keterlambatan implementasi di lingkungan TNI AL yang akan dijelaskan dalam bagian hasil dan pembahasan ini.

Dalam pandangan Edward III (Nugroho, 2018) ada empat faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu

- (1) Komunikasi. Dalam implementasi kebijakan SBSN sebagai sumber pembiayaan perumahan militer, dalam konteks komunikasi Bappenas membangun komunikasi lingkup pembahasan SBSN yang berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Yaitu dimulai dengan menginformasikan bahwa ada upaya untuk memperluas skema pendanaan alternatif untuk SBSN. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui prosedur berjenjang di dalam kementerian keuangan. Dalam hal ini masuk dalam konteks watak dan sikap serta struktur birokrasi di tubuh stekholder kebijakan SBSN yaitu kementerian yang bersangkutan dan pihak TNI AL itu sendiri. Seperti yang diungkap dalam wawancara berikut:

“Proses awal itu penjabatan itu melalui diskusi rapat dan seterusnya setelah itu ditetapkan selanjutnya kita melalui surat, kita informasikan bahwa ada upaya untuk memperluas skema pendanaan alternatif untuk SBSN, sehingga pada saat itu kita minta datanya untuk melanjutkan secara berjenjang ke teman-teman pendanaan dan Kementerian Keuangan” (Wawancara bersama Fauzal pada tanggal 22 April 2022).

Pihak TNI AL mengakui bahwa program SBSN baru diketahuinya pada tahun 2021 ketika narasumber menyusun rencana kerja TNI AL.

“Saya mulai mendengar SBSN semenjak itu tahun 2021 saat saya Menyusun rencana kerja untuk TNI AL itu yang baru, tahun 2021” (Wawancara bersama Yus Priantono pada tanggal 12 April 2022).

Ia tidak mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Narasumber menilai peraturan pemerintah yang dijabarkan di tingkat kementerian seharusnya dilakukan sosialisasi secara top down (dari atas ke bawah) untuk masing-masing lembaga terkait.

- (2) Disposisi, Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya

mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam implementasinya, sebenarnya penggunaan SBSN adalah usulan dari kebijakan prioritas masing-masing kementerian/lembaga tanpa ada intervensi dari Kementerian Keuangan. Kemauan itu juga bersambut dengan adanya dispoisi ataupun filteriasi dan prioritas yang ditetapkan oleh Bappenas.

“Dari sisi kami sih sangat membuka silahkan, tinggal Bagaimana kebijakan terkait prioritas di Bappenas, silahkan aja Kemhan berkoordinasi dengan Bappenas karena kami tidak boleh seolah-olah mengintervensi” (Wawancara bersama Agus staf DJPPR tanggal 12 Mei 2022).

- (3) SDM, Resource atau Suberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Namun dalam hal ini, peneliti memandang Bappenas harus mempelajari dengan cukup panjang dari dikeluarkannya UU SBSN tahun 2008 hingga dikeluarkannya PP No 56 Tahun 2011 terkait pembiayaan SBSN untuk mengkaji skema ini hingga dapat digukan untuk pembiayaan bidang pertahanan. Kementrian Keuangan sendiri hanya sebagai alokator anggaran yang mengu disposisi dari Bappenas. Sedangkan Kemenhan, khususnya TNI AL terlambat mendapatkan informasi terkait skema pembiayaan SBSN yang menyebabkan keterlambatan dan berefek pada pengajuan pembiayaan SBSN. kualitas SDM sendiri juga dipengaruhi oleh adanya banyaknya tugas yang diemban. Koordinasi yang terbangun di internal TNI AL dinilai masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya tugas rangkap diluar tugas pokok.

“Saya melihat sih masih kurang karena kadang-kadang banyak tugas-tugas yang di luar dari tugas pokoknya sehingga penjabaran ke bawah kadang-kadang terlewati sehingga penyampaian-penyampaian kebijakan yang dari pimpinan harus... apa namanya disampaikan ke bawah itu secara berjenjang itu kan ada tidak tersampaikan juga” (Wawancara bersama Yus Priantono pada tanggal 12 April 2022).

- (4) Struktur Birokrasi. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti diungkap oleh Edward III (dalam Widodo, 2010), bahwasanya terdapat dua karakteristi utama birokrasi yaitu Standar Operasional Procedur (SOP) dan fragmantasi. Dalam implementasinya, sebenarnya penggunaan SBSN adalah usulan dari kebijakan prioritas masing-masing kementerian/lembaga tanpa ada intervensi dari Kementerian Keuangan. Kemauan itu juga bersambut dengan adanya dispoisi ataupun filteriasi dan prioritas yang ditetapkan oleh Bappenas.

“Dari sisi kami sih sangat membuka silahkan, tinggal Bagaimana kebijakan terkait prioritas di Bappenas, silahkan aja Kemhan berkoordinasi dengan Bappenas karena kami tidak boleh seolah-olah mengintervensi” (Wawancara bersama Agus staf DJPPR tanggal 12 Mei 2022).

Kebijakan pembiayaan SBSN merupakan kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru, utamanya dalam hal ini dalam bidang pertahanan. Setelah digali dan diteliti lebih lanjut oleh Dirhankam Bappenas terkait dengan perluasan kemenfaatan SBSN barulah disepakati bahwasanya pendanaan menggunakan SBSN bisa digunakan untuk bidang pertahanan

khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat umum, salah satunya adalah pembangunan rumah dinas. Hal ini seperti diungkapkan dalam wawancara berikut:

"Saat itu kami mengembangkan, memperluas skema pembiayaan untuk bisa membantu, maka yang terpikir waktu itu bagaimana dengan SBSN. Kita jajaki pendaan aturan SBSN digunakan untuk prajurit boleh tidak? kita coba bedah pasal itu, ternyata tidak ada isu dan konsennya terkait dengan fatwa MUI terkait penggunaan SBSN dalam pembiayaan. Kemudian salah lingkupnya, yang mencakup pelayan umum, infrastuktur hubungan dalam hal ini bukan secara langsung. Maka disepakati dalam pertemuan itu, SBSN ini dapat dimanfaatkan baik secara regulasi dan substansi untuk mendukung perumahan prajurit," (Wawancara Fauzal, Tanggal 22 April 2022).

5 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan public terdapat missinglink atau keterhambatan komunikasi dalam lingkaran SDM antara Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan termasuk di dalamnya TNI Angkatan Laut. Adanya masalah komunikasi dalam level implementasi akan mempengaruhi disposisi, SDM dan struktur birokrasi. Dimana sebagai pelaksana teknis, pihak TNI AL merasa kurang mendapatkan informasi tersebut. Bahkan dapat dikatakan baru mendapatkan informasi secara resmi justru pada tahun 2021 dimana program SBSN untuk perumahan prajurit di setuju oleh Kementerian Bappenas dan Keuangan.

Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa optimalisasi komunikasi kebijakan antar lembaga perlu diperkuat, khususnya dalam bentuk sistem koordinasi yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan komunikasi kebijakan, pemetaan peran antar instansi, serta pengembangan platform informasi bersama antar lembaga terkait diharapkan dapat meminimalkan hambatan komunikasi dan mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat waktu di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar 2017. "Teori Negosiasi – Pendekatan – Landasan." Diakses pada Januari 2023 <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi>.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, Reina Hapsari, and Amni Zarkasyi R. 2018. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kampung Tematik Di Kelurahan Rejomulyo." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Azka Rinaldi Mohammad. 2018. "Ini Detail Proyek Yang Dibiayai SBSN Pada 2019." Diakses pada Januari 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181221/9/872020/ini-detail-proyek-yang-dibiayai-sbsn-pada-2019>.
- Badan Keamanan Rakyat. n.d. "Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)." Diakses pada Januari 2023. https://p2k.mputantular.ac.id/id1/2-120-17/Tri-Angkatan-Laut_29992_p2k-mputantular.html.
- Canary, Heather E., Maria Blevins, and Shireen S. Ghorbani. 2015. "Organizational Policy Communication Research: Challenges, Discoveries, and Future Directions." *Communication Reports* 28 (1): 48–64. <https://doi.org/10.1080/08934215.2013.865063>.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fiske John (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Ketiga*. Depok: Rajawali Pers

- Hananto Akhyari. 2017. "Dikukuhkan Di New York Agustus Ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau Di Indonesia." Diakses pada Januari 2023. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york-agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia>.
- Hanifah Rifka, Vinda Fauzia Hamdani Putri, and Ajeng Setia Utari. 2021. "Commodification, Spatialization, and Structuring in Instagram (Vincent Mosco's Descriptive Political Economy Study on Instagram Anies Baswedan Related to Covid-19)." *Jurnal Komunikatio* 7 (1): 1–14. <https://doi.org/10.30997/jk.v7i1.4235>.
- Hendra, W. (2020). *Panduan Strategi Negosiasi*. PT PLN Batubara. https://knowledgemanagement.plnbatubara.co.id/wp-content/uploads/2020/11/Buku-Panduan-Strategi-Negosiasi_Final-2-compressed.pdf
- Heryanto, Gun Gun & Rumar, Shulhan 2013, *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hidayat Setiaji. 2019. "Anggaran Pertahanan RI Terkecil Kedua Di Asia, Tapi..." Diakses pada Januari 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190331120703-4-63935/anggaran-pertahanan-ri-terkecil-kedua-di-asia-tapi>.
- Kementrian Keuangan. "Satu Dasawara Suku Negara." Diakses pada Januari 2023. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/cari>.
- Kementrian Pertahanan Repoblik Indonesia. 2012. "Menhan Dan Menpera Letakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Prajurit TNI Dan PNS." Diakses pada Januari 2023. <https://www.kemhan.go.id/2012/07/20/menhan-dan-menpera-letakan-batu-pertama-pembangunan-rumah-prajurit-tni-dan-pns.html#>.
- Kementrian Pertahanan. 2020. "Jokowi Ingin Prajurit TNI Sejahtera, Ini Instruksinya Ke Prabowo." Diakses pada Januari 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-ingin-prajurit-tni-sejahtera-ini-instruksinya-ke-prabowo>.
- Konsulat Jendral Republik Indonesia Frankfurt. *Sekilas Tentang Indonesia*. Diakses November 2021. <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20kepulauan%20terbesar,merupakan%20pulau%20utama%20di%20Indonesia.&text=Ibukota%20negara%20Indonesia%20adalah%20Jakarta%2C%20yang%20terletak%20di%20Pulau%20Jawa>
- Kuntadi Cris, and Nurma Livrianti. 2022. "Performance-Based Budgeting Policies : Communication, Resources , And Bureaucratic" *02* (4): 466–484.
- Mayrizka Dwindi. 2014. "Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sidoarjo)." Brawijaya University.
- Minaeva Liudmila. 2019. "Government Communication in Digital Environment" *273* (Csis 2018): 50–53. <https://doi.org/10.2991/csis-18.2019.10>.
- Moeleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchlisin Riadi. 2020. "Pengertian, Aspek, Jenis Dan Strategi Negosiasi." Diakses pada Januari 2023. <https://www.kajianpustaka.com/2020/02/pengertian-aspek-jenis-dan-strategi-negosiasi.html>.
- Muhammad, A. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhawarman Aji, Dumilah Ayuningtyas, and Miananiarti Misnaniarti. 2017. "Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 13 (2): 97. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i2.1980>.
- Mulyana D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pace R.W., Don F. (2015). *Komunikasi organisasi: strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Pricahyadi Moris, and Thoriq Ramadani. 2019. "Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 16 (1): 112–126.
- Quy Huynh, and Thai Thanh Ha. 2018. "An Empirical Assessment of Public Policy Communications in Central Region of Vietnam." *Modern Economy* 09 (12): 2052–63. <https://doi.org/10.4236/me.2018.912128>.
- Rakhmat Jalaluddin, Ibrahim Idi Subandy (2019). *Metode Penelitian Komunikasi*, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekayasa Media
- Ranama Aniza Lestari, Agus Iwan Mulyanto, Irvan Arif Kurniawa. 2021. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) Di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* Vol 11 No 2 Tahun 2021: 78 - 86 .
- Rangkuti Zoraya Alfathin, M Ridwan Rangkuti, Medan City, Transportation Service, and Komunikasi Kebijakan. 2021. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program" 3 (2): 141–152.
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Romli, K. (2011). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2019. "10 Negara Dengan Anggaran Pertahanan Tertinggi Di Dunia, Apa Saja?" Diakses pada Januari 2023. <https://money.kompas.com/read/2019/04/30/151759726/10-negara-dengan-anggaran-pertahanan-tertinggi-di-dunia-apa-saja?page=all>.
- Subekti Mening, Muslih Faozanudin, and Ali Rokhman. 2017. "Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak." *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)* 3 (2): 58–71.
- Sudarsono Achmad Budiman. 2019. "Dominasi Dan Legitimasi Expatriate Pada Tenaga Kerja Lokal Restoran (Strukturasi Komunikasi Kelompok Pekerja Crystal Jade Restoran)." *Oratio Directa* 2 (1).
- Sugiharto. 2012. "Presiden: Wujudkan Perumahan Prajurit TNI!" Diakses pada Januari 2023. <https://regional.kompas.com/read/2012/10/05/1417134/presiden.wujudkan.perumahan.prajurit.tni>.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Syaripudin A. F, T Nur, and D Meigawati. 2020. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kota Sukabumi." *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 8 (2): 82–86. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.4004>.
- Teguh, M. (2014). *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tentara Nasional Angkatan Laut. "Daftar Pejabat Utama TNI Angkatan Laut." Diakses pada Januari 2023 <https://www.tnial.mil.id/organisasi/>.
- Webinar Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 Ditayangkan live tanggal 20 Jan diakses 18 Januari 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=6YqQLnzg2YQ> diakses 18 Januari 2023
- West Richard, Turner Lynn H. (2017) *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*, Edisi 5, buku 1. Jakarta: Salemba Humanika
- West Richard, Turner Lynn H. (2017) *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*, Edisi 5, buku 2. Jakarta: Salemba Humanika
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi. Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo.

- Winengan. 2016. “Kuasa Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Aras Lokal (Studi Pada Kebijakan Pembebasan Lahan Kawasan Mandalika Resort Di Lombok) Winengan Universitas Islam Negeri Mataram.” *Jurnal Review Politik* 06 (2): 367–387.
- Yin Robert K (2018). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Depok: Rajawali Pers